

PENGEMBANGAN KOMPONEN KOMPETENSI KEWARGAAN DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMP/MTs

Dikdik Baehaqi Arif

Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

e-mail: dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

Abstract

This essay was aimed at describing the development of civic knowledge, civic skill and civic disposition on textbooks for junior high school namely “Belajar Memahami Kewarganegaraan 1, 2 and 3”. Based on content analysis, it can be conducted that civic education element was developed through teaching material presented accompanied by features, such as additional boxes, every chapter including pictures, law corner, info, public figures, and citizenship dictionary. In addition to presentation of civic skill related teaching material, box of “uji kompetensi” was utilize to enhance civic skill competences. Civic disposition was enhanced by inserting national values as well as up-held-values but conceptually.

Keywords: civic education, text book, civic competences

PENDAHULUAN

Buku teks (*textbook*) memiliki kedudukan yang strategis dalam proses belajar mengajar. Sebagai jenis buku yang diperuntukkan bagi peserta didik untuk bekal pengetahuan dasar sesuai bidang ilmu, buku teks ini sering menjadi acuan sekaligus sumber belajar yang utama. Bahkan buku teks bukan hanya menjadi rujukan para peserta didik, tetapi juga menjadi acuan utama para guru dalam praktik pembelajaran. Besarnya ketergantungan ini menuntut tersedianya buku teks yang berkualitas, baik dilihat dari segi isi materi (*content*), pedagogis dan keterbacaan (*readability*). Sehingga buku teks benar-benar dapat memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri, mengembangkan daya nalar, keterampilan, dan lebih jauh membentuk sikap atau watak peserta didik.

Dewasa ini, untuk memenuhi ketersediaan buku teks setiap mata pelajaran, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menyusun kebijakan perbukuan nasional berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE). Kebijakan yang menyediakan buku pelajaran dalam bentuk *file* yang dapat diunduh gratis itu di satu sisi dapat meringankan beban orang tua dalam pengadaan buku, tetapi di sisi lain, ketersediaan BSE itu

tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh sebagian besar peserta didik karena keterbatasan sarana dan prasarana, seperti komputer dan akses internet.

Bahkan dalam pandangan Abdulkarim (2010) permasalahan buku teks tidak berhenti pada keterbatasan sarana dan prasarana untuk mengakses buku teks tersebut, tetapi juga pada kualitas buku teks yang tidak dapat memandu proses pembelajaran di kelas. Karena itu, pada beberapa kasus, guru tidak menggunakan buku teks yang ada walaupun telah direkomendasikan (lulus penilaian) Pemerintah.

Idealnya, buku teks tidak hanya melakukan transfer pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dapat merangsang siswa untuk melakukan perubahan perilaku dan mampu membentuk pandangan dunia (*world view*) siswa, termasuk di dalamnya cara pandang siswa dalam memahami dan menyikapi realitas kehidupan nyata berbangsa dan bernegara (Abdulkarim, 2010). Sudahkah buku teks yang ada memenuhi ketiga aspek itu? Hal ini patut dilakukan analisis. Sebagai contoh, dalam konteks buku teks Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian yang dilakukan Abdulkarim (2006) pada beberapa SMA di Kota Bandung menyimpulkan bahwa secara taksonomi, pada hampir setiap buku teks lebih cenderung pada aspek pengetahuan (*knowledge*). Buku teks PKn belum memiliki muatan materi yang dapat memotivasi, merangsang, dan melatih kemampuan berpikir siswa kadar tinggi. Buku teks PKn masih belum mengakomodasi tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*) yang tampak pada penyajian materi yang belum mendorong siswa untuk belajar pada pusat-pusat kegiatan warga negara, mengamalkan isi pembelajaran, dan memacu keingintahuan siswa. Begitupun dalam penyajiannya kurang mendorong kesadaran politik dan hukum, kepedulian sosial, cara berpikir kritis, dan kesadaran adanya kemajemukan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyajian buku teks PKn. Diantaranya adalah pada aspek isi (*content*) yang baru menyajikan transfer pengetahuan (*knowledge*) saja, dan belum banyak menyajikan aspek afektif dan psikomotor. Dalam konteks isi inilah penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini memfokuskan diri untuk menganalisis buku teks

PKn tingkat SMP/MTs pada aspek isi (*content*). Isi yang dimaksud adalah kompetensi kewargaan yang merupakan komponen PKn.

Penelitian yang dilakukan IEA terhadap implementasi PKn di 28 negara secara umum menyimpulkan bahwa komponen PKn meliputi aspek *civic knowledge*, *civic engagement*, dan *civic attitudes* serta konsep lainnya (Torney-Purta, *et.al*, 2001:179). Adapun materi PKn yang diteliti meliputi materi demokrasi, kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan internasional dan keragaman/koehsi sosial (Torney-Purta, *et.al*, 2001:29-30).

Patrick dan Vontz (1999:34; 2001:4) mengelompokkan komponen kompetensi kajian kewargaan menjadi empat, yaitu (1) *knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge)*; (2) *cognitive skills of democratic citizenship (cognitive civic skills)*; (3) *participatory skills of democratic citizenship (participatory civic skills)*; dan (4) *virtues and dispositions of democratic citizenship (civic disposition)*. Dari keempat komponen itu, Patrick dan Vontz (2001:46) menjabarkan ke dalam materi pokok kajian pengetahuan PKn menjadi tujuh topic, yaitu (1) demokrasi perwakilan (*representative democratic*); (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi (*liberalism*); (4) kewarganegaraan (*citizenship*); (5) masyarakat kewargaan (*civil society*); (6) ekonomi pasar (*free and open economic system*); dan (7) tipe-tipe masalah publik. Tipologi komponen kompetensi tersebut oleh CCE (1994) dikenalkan dengan tiga komponen, meliputi *civic knowledge* (pengetahuan kewargaan), *civic skills* (keterampilan kewargaan, meliputi *cognitive skills* dan *participatory skills*) dan *civic dispositions* (watak kewargaan).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji pengembangan buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs terutama yang berkaitan dengan penguatan komponen kompetensi kewargaan. Fokus tulisan ini dilandasi kesadaran bahwa komponen kompetensi kewargaan sebagai isi buku teks, bukan satu-satunya komponen untuk menilai kualitas buku teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. Artikel ini berturut-turut membahas tentang pengembangan pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*) dalam buku teks PKn SMP/MTs, pengembangan keterampilan kewargaan (*civic skill*) dalam buku teks

PKn SMP/MTs, dan pengembangan watak kewargaan (*civic disposition*) dalam buku teks PKn SMP/MTs.

METODE PENELITIAN

Artikel ini diturunkan dari hasil penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (1998) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Penelitian ini merupakan analisis isi (*content analysis*) sebagai salah satu tradisi penelitian kualitatif. Peneliti tidak menggunakan upaya kuantifikasi atau perhitungan-perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan kepada kajian interpretatif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi dokumentasi.

Sumber data berupa Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan di SMP/MTs, serta buku-buku yang berkaitan dengan kompetensi kewargaan (*civic competence*). Selain itu digunakan pula sumber data lain, seperti jurnal, makalah-makalah dan sumber internet sebagai unsur penunjang penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kompetensi Pengetahuan Kewargaan dalam buku teks PKn SMP/MTs

Pengetahuan kewargaan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini sifatnya mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global. Dengan kata lain, pengetahuan kewargaan berisi materi pembelajaran (*learning materials*), yaitu “sekumpulan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk membantu tercapainya kompetensi atau tujuan pembelajaran” (Gafur, 2012).

Berdasarkan Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP/MTs

dikelompokkan ke dalam delapan ruang lingkup materi, yaitu: Persatuan dan Kesatuan bangsa; Norma, hukum dan peraturan; Hak asasi manusia; Kebutuhan warga negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi. Kedelapan ruang lingkup materi PKn SMP/MTs tersebut selanjutnya diperinci ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang masing-masing berarti sebagai berikut:

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Sedangkan Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi (Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Pengetahuan kewargaan yang termuat dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar atau materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, menurut Merrill (Gafur, 2012) memuat “fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi”. Muatan jenis pengetahuan kewargaan tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jenis Pengetahuan Kewargaan

Materi	Penjelasan	Contoh
Fakta	sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda, yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera.	Ibukota Indonesia adalah Jakarta. Manusia berjalan dengan kaki.
Konsep	abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat.	konsep anak laki-laki, anak perempuan, pasar, dll.
Prosedur	materi pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu.	langkah-langkah percobaan.
Prinsip	Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip.	prinsip radiasi, penguapan, dll.

Sumber: Diolah dari Gafur (2012)

Berdasarkan analisis terhadap buku teks BMKn (1), (2), dan (3) karya Samidi dan Widyaningtyas, pada dasarnya, materi substansi yang disajikan dalam

buku teks BMKn sudah mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sebagaimana ditetapkan melalui Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dalam proses pengembangan materi substansi pengetahuan kewargaan ke dalam buku teks, setidaknya ada tiga langkah yang diikuti oleh penulis, yaitu:

1. Mengkaji dan menentukan Standar Kompetensi
2. Mengkaji dan menentukan Kompetensi Dasar
3. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Ketiga langkah tersebut tercermin dalam buku teks BMKn (1), (2), dan (3) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2 Substansi Materi Buku Teks BMKn (1)

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dalam Buku Teks
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	BAB I Peraturan, norma, dan hukum A. Hakikat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat B. Hakikat dan arti penting hukum C. Penerapan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama	Bab 2 Proklamasi dan Konstitusi Pertama A. Proklamasi kemerdekaan B. Suasana kebatinan dan nilai-nilai konstitusi pertama C. Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi pertama
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM	Bab 3 Hak Asasi Manusia A. Hakikat hak asasi manusia B. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia C. Menghargai upaya

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dalam Buku Teks
	3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM	perlindungan hak asasi manusia D. Menghargai upaya penegakan hak asasi manusia E. Dukungan masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab	Bab IV Kemerdekaan mengemukakan pendapat A. Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat B. Arti penting kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab C. Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat

Tabel 3 Substansi Materi Buku Teks BMKn (2)

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dalam Buku Teks
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Bab 1 Ideologi dan nilai-nilai Pancasila A. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara B. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara C. Sikap positif terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen	Bab 2 Konstitusi negara A. Konstitusi di Indonesia B. Sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan bentuk penyimpangannya C. Arti pentingnya amandemen UUD 1945 D. Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-	3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan	Bab 3 Peraturan perundang-undangan nasional A. Tata urutan peraturan

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dalam Buku Teks
undangan nasional	<p>3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <p>3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia</p>	<p>perundang-undangan</p> <p>B. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <p>C. Menaati peraturan perundang-undangan</p> <p>D. Korupsi, kolusi dan nepotisme</p> <p>E. Pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <p>F. Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi</p> <p>G. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p>
4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	<p>4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi</p> <p>4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan</p>	<p>Bab 4 Masyarakat Demokratis</p> <p>A. Hakikat demokrasi</p> <p>B. Kehidupan demokrasi dalam kenegaraan</p> <p>C. Hakikat demokrasi Pancasila</p> <p>D. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan</p>
5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	<p>5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat</p> <p>5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat</p> <p>5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia</p>	<p>Bab 5 kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia</p> <p>A. Kedaulatan rakyat</p> <p>B. Pemegang kedaulatan rakyat</p> <p>C. Hakikat partai politik</p> <p>D. Menampilkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem politik Indonesia</p>

Tabel 4 Substansi Materi Buku Teks BMKn (3)

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dalam Buku Teks
1. Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara	<p>1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara</p> <p>1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara</p> <p>1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara</p>	<p>Bab 1 Usaha Pembelaan Negara</p> <p>A. Negara</p> <p>B. Arti pentingnya usaha pembelaan negara</p> <p>C. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara</p> <p>D. Berperan serta dalam usaha pembelaan negara</p>
2. Memahami pelaksanaan otonomi daerah	<p>2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah</p> <p>2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam</p>	<p>Bab 2 Otonomi Daerah</p> <p>A. Pengertian dan hakikat otonomi daerah</p> <p>B. Dasar hukum pelaksanaan</p>

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dalam Buku Teks
	perumusan kebijakan publik di daerah	otonomi daerah C. Tujuan dan manfaat pelaksanaan otonomi daerah D. Prinsip dan asa otonomi daerah E. Pembagian urusan pemerintahan F. Pemerintahan daerah G. Masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah H. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public I. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah
3. Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia 3.2 Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global 3.3 Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.4 Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi	Bab 3 Globalisasi A. Arti penting globalisasi bagi Indonesia B. Politik luar negeri dalam hubungan internasional di era globalisasi C. Dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara D. Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi
4. Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa	4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa 4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan 4.3 Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa	Bab 4 Prestasi diri demi keunggulan bangsa A. Arti penting prestasi diri bagi keunggulan bangsa B. Potensi diri untuk berprestasi C. Berpartisipasi pada berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai dengan kemampuan demi keunggulan bangsa

Untuk pengembangan pengetahuan kewargaan (yang berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), selain menyajikan pembahasan materi pokok pada setiap bab, penulis juga memperkaya pengetahuan kewargaan dengan menyajikan *box* tambahan pada setiap bab, yaitu: pemuatan gambar, biro hukum, info, tokoh, dan kamus kewarganegaraan. Berdasarkan Petunjuk Penggunaan buku, *Gambar* disajikan agar peserta didik mengetahui gambar yang berkaitan dengan pembelajaran; *Biro hukum*, disajikan agar peserta didik dapat belajar tentang hukum dan peraturan perundang-undangan melalui materi atau tugas. *Info*, disajikan agar peserta didik dapat belajar untuk menganalisis informasi atau berita

dari satu permasalahan yang ada. *Tokoh*, disajikan agar peserta didik dapat menambah pengetahuan melalui pengenalan tokoh nasional sehingga dapat meningkatkan jiwa nasionalisme. *Kamus*, disajikan agar peserta didik dapat mengetahui arti setiap kata penting dalam materi.

2. Pengembangan Kompetensi Keterampilan Kewargaan dalam Buku Teks PKn SMP/MTs

Dalam bahasan tentang keterampilan kewargaan (*civic skill*) pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa *civic skill* dikembangkan dari pengetahuan kewargaan, dengan maksud agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, sebab dapat dimanfaatkan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewargaan ini meliputi keterampilan-keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*).

Pertama, keterampilan intelektual melatih warga negara untuk memiliki kemampuan berpikir kritis (berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab). Dengan menggunakan deskripsi *The National Standards of Civic and Government* dan *The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress* (NAEPP), kategori keterampilan-keterampilan ini meliputi: 1) *identifying and describing* (mengidentifikasi dan mendeskripsikan); 2) *explaining and analyzing*; (menjelaskan dan menganalisis), and 3) *evaluating, taking and defending positions on public issues* (mengevaluasi, menarik dan mempertahankan posisi) dalam isu-isu publik (Branson, 1998:8).

Dalam buku teks BMKn (1), (2), dan (3), keterampilan kewargaan (yang meliputi keterampilan intelektual, dan keterampilan partisipatif) ini dikembangkan, baik dalam bentuk **Materi** yang berkaitan dengan keterampilan kewargaan, maupun dalam latihan-latihan berupa *box Uji Psikomotorik*. Bahkan, pada beberapa bagian dapat pula ditemui dalam bentuk **Uji Kognitif** dan **Uji Afektif** yang substansinya sebenarnya lebih tepat disebut sebagai uji Psikomotorik. Dalam petunjuk penggunaan buku, *Uji Psikomotorik* disajikan agar peserta didik dapat belajar berpendapat terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan materi sehingga dapat menambah kompetensi.

Secara garis besar, sajian materi, dan latihan-latihan (uji psikomotorik) yang terdapat dalam buku teks BMKn (1), (2), (3), belum secara tegas menyebut keterampilan intelektual yang sejatinya dimiliki warga negara. Padahal keterampilan-keterampilan intelektual ini penting untuk seorang warga negara agar ia memiliki kemampuan berpikir kritis.

Kedua, tentang keterampilan partisipatif (meliputi *interacting, monitoring, and influencing*, Branson [1998:9]) yang dikembangkan melalui Buku teks BMKn (1), (2), dan (3), dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Interaksi (*interacting*), berkaitan dengan keterampilan-keterampilan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Untuk mengembangkan kemampuan interaksi ini, penulis merancang kegiatan siswa untuk berinteraksi dengan warga negara yang lain melalui **uji kognitif**, sebagai contoh dalam buku teks BMKn (1) terdapat uji kognitif sebagai berikut:

Uji Kognitif

Lakukan wawancara terhadap masyarakat di sekitar kalian.

1. Pilihlah beberapa orang yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda-beda.
2. Tanyakan kepada mereka tentang bentuk norma agama menurut keyakinannya.
3. Tuliskan penjelasan tentang bentuk-bentuk norma agama tersebut (BMKn [1], hlm 4)

Judul *box* Uji Kognitif di atas, jika dilihat substansinya ternyata tidak tepat. Sebab substansinya lebih menuntun siswa untuk melakukan sesuatu, yaitu berinteraksi melalui wawancara. Semestinya, judul *box* yang tepat adalah Uji Psikomotorik.

- b. Memonitor (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Monitoring juga berarti fungsi pengawasan atau *watchdog* warga negara. Kegiatan monitoring ini, walaupun tidak secara

eksplisit disebutkan sebagai kegiatan monitoring, dapat ditemui dalam uji psikomotorik seperti contoh berikut:

Uji Psikomotorik

Bentuklah kelompok dalam kelas kalian. Lakukan kegiatan berikut.

1. Amatilah jalan, perempatan, pertigaan di sekitar kalian
 2. Tuliskan banyaknya pelanggaran yang terjadi
 3. Jelaskan penyebab terjadinya pelanggaran itu.
 4. Menurut kalian, usaha apa untuk mengatasi tidak terjadinya pelanggaran itu.
- Hasil kegiatan ditulis dalam bentuk laporan tertulis.

(BMKn [1], hlm 22)

- c. Mempengaruhi (*Influencing*), mengisyaratkan pada kemampuan proses-proses politik dan pemerintahan dalam masyarakat.

Keterampilan partisipatoris dalam hal mempengaruhi yang penulis rancang terdapat dalam contoh berikut ini:

Uji Afektif

Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

1. Menurut pendapat kalian, bagaimana upaya pelaksanaan tujuan tersebut?
2. Bagaimana **peran serta kalian** (*cetak tebal oleh peneliti*) dalam pelaksanaan tujuan tersebut?

(BMKn [1], hlm 47)

Dari *box* Uji Afektif tersebut, keterampilan partisipatoris yang hendak dikembangkan oleh penulis terdapat pada kata yang dicetak tebal dalam pertanyaan kedua, yaitu tentang peran serta siswa dalam pelaksanaan tujuan negara. Hal ini sama seperti yang ditemui pada Uji Afektif dalam BMKn (1) lainnya seperti dikemukakan berikut:

Uji Afektif

Dewasa ini kita sering mendengar peristiwa penganiayaan, penyiksaan, ataupun penderitaan lainnya yang dialami para TKW di luar negeri. Bagaimanakah usaha dan peranan pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Hukum dan HAM untuk mengatasi peristiwa tersebut? Bagaimana pula **peran serta** (*cetak tebal oleh peneliti*) yang dapat kalian lakukan ketika mendengar ada tetangga kalian ingin ikut menjadi TKW?

(BMKn [1], hlm 89)

Kata yang dicetak tebal menunjukkan pertanyaan yang menuntut partisipasi siswa dalam permasalahan penderitaan para TKW di luar negeri. Siswa

diminta memikirkan peran serta yang dapat mereka lakukan ketika mendengar ada tetangganya yang berkeinginan menjadi TKW di luar negeri.

3. Pengembangan Kompetensi Watak Kewargaan dalam Buku Teks PKN SMP/MTs

Watak kewargaan (*civic disposition*) dimaksud oleh Quigley, dkk (1991:11) adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” yaitu sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, menurut Quigley, dkk (1991:13-14) watak kewargaan (*civic disposition*) mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni:

civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles and limit to compromise), toleration of diversity, patience and persistence, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles.

Berdasarkan kutipan di atas, diketahui beberapa karakteristik kepribadian yang membangun watak kewargaan sebagai berikut: 1) kesopanan, yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi; 2) tanggung jawab individual; 3) disiplin diri; 4) kepedulian terhadap masyarakat; 5) keterbukaan pikiran, yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan; 6) sikap kompromi, yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi; 7) toleransi pada keragaman; 8) kesabaran dan keajekan; 9) keharuan; 10) kemurahan hati; dan 11) kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Untuk keperluan pengembangan watak kewargaan, buku teks BMKn (1), (2), dan (3) telah menambahkan *box* khusus dalam setiap bab untuk mengungkap nilai-nilai watak atau karakter yang semestinya dikembangkan oleh siswa, yaitu ***box Nilai Karakter Bangsa***. Di samping itu, terdapat pula ***box Nilai Budi Pekerti*** pada setiap akhir bab, dan bahkan muncul ***box Nilai Pendidikan Kewirausahaan*** (ditemui pada BMKn [1], hlm 81).

Dari tiga tingkatan buku teks BMKn, karakter bangsa yang diungkap dan dikembangkan oleh penulis, yaitu dalam *box* karakter bangsa sebagai berikut:

Tabel 5 Nilai Karakter Bangsa pada Buku Teks BMKn (1), (2), dan (3) SMP/MTs

BMKn 1 (Kelas VII)	BMKn 2 (Kelas VIII)	BMKn 3 (Kelas IX)
<ol style="list-style-type: none"> 1. religius (hlm 4) 2. disiplin (hlm 8) 3. semangat kebangsaan (hlm 40) 4. toleransi (hlm 42 dan 118) 5. peduli sosial (hlm 73) 6. kerja keras (hlm 91) 7. tanggung jawab (hlm 98) 8. demokrasi (hlm 112) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi (hlm 5) 2. Cinta tanah air (hlm 21) 3. Disiplin (hlm 43, 60) 4. Semangat kebangsaan (45) 5. Kerja keras (hlm 67) 6. Jujur (hlm 77) 7. Religius (hlm 78) 8. Demokratis (hlm 102, 104, 122) 9. Kepemimpinan yang jujur dan tanggung jawab (hlm 109) 10. Kepemimpinan (hlm 133) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cinta tanah air (hlm 4) 2. Bersahabat/komunikatif (hlm 15) 3. Cinta damai (hlm 23) 4. Pantang menyerah (hlm 29) 5. Semangat kebangsaan (hlm 36) 6. Kreatif (hlm 50) 7. Jujur dan demokratis (hlm 61) 8. Tanggung jawab (hlm 69) 9. Mandiri (hlm 70) 10. Inovatif dan kreatif (hlm 87) 11. Menghargai prestasi (hlm 121)

Sementara itu, nilai budi pekerti pada buku teks BMKn (1) diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 6 Nilai Budi Pekerti pada Buku teks BMKn (1)

Bab 1 Peraturan, norma, dan hukum	Bab 2 Proklamasi dan Konstitusi Pertama	Bab 3 Hak Asasi Manusia	Bab 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
<p>Nilai Kereligiusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sikap toleransi • Melaksanakan ibadah dengan baik • Menghormati orang yang sedang beribadah • Menolak setiap sikap, tindakan dan kebijakan yang menyimpang atau menodai agama <p>Nilai kepatuhan pada aturan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi tata tertib sekolah • Mematuhi norma kesusilaan, kesopanan dan peraturan yang berlaku 	<p>Nasionalisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rasa cinta tanah air (menghormati pahlawan, melakukan upacara bendera, memperingati hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu kebangsaan, melakukan kegiatan pelestarian lingkungan) • Mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara • Memelihara dan mengembangkan pilar-pilar 	<p>Kejujuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menepati janji • Berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan fakta/tidak berbohong <p>Kereligiusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan toleransi beragama • Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah <p>Kepatuhan pada aturan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi norma, kebiasaan, adat, dan peraturan yang berlaku • Tidak berbuat sewenang-wenang, anarkis, main hakim sendiri <p>Kesadaran akan hak</p>	<p>Kejujuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan fakta/tidak berbohong <p>Demokratis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghormati pendapat dan hak orang lain • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain <p>Bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berani menanggung resiko atau akibat dari segala perbuatannya (BMKn [1], hlm 122)

<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berbuat sewenang-wenang, anarkis, main hakim sendiri atau melakukan tindakan di luar ketentuan <p>Kejujuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkata jujur, tidak berbohong (BMKn [1], hlm 22) 	<p>kenegaraan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKR, dan Bhineka Tunggal Ika</p> <p>Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan yang bersifat membangun • Memberikan idea tau gagasan yang baik untuk kepentingan umum • Memaparkan pendapat didasarkan pada fakta empiric (BMKn [1], hlm 53) 	<p>dan kewajiban diri dan orang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersikap dan bertindak adil • Menghargai hak-hak orang lain (BMKn [1], hlm 101). 	
--	---	---	--

Nilai budi pekerti pada buku teks BMKn (2) diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 7 Nilai Budi Pekerti pada Buku teks BMKn (2)

Bab 1 Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila	Bab 2 Konstitusi Negara	Bab 3 Peraturan Perundang-undangan Nasional	Bab 4 Masyarakat Demokratis	Bab 5 Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
<p>Nasionalisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara • Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan budaya daerah maupun nasional • Memelihara dan mengembangkan pilar-pilar kenegaraan, yaitu Pancasila, UUD 1945, 	<p>Nasionalisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara dan mengembangkan pilar-pilar kenegaraan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika <p>Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan 	<p>Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain <p>Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengemukakan / mengusulkan 	<p>Tidak dikembangkan nilai-nilai budi pekerti</p>	<p>Kejujuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan fakta/tidak berbohong <p>Demokratis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghormati pendapat dan hak orang lain • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain • Bertanggung jawab:

Bab 1 Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila	Bab 2 Konstitusi Negara	Bab 3 Peraturan Perundang-undangan Nasional	Bab 4 Masyarakat Demokratis	Bab 5 Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
<p>NKRI dan Bhineka Tunggal Ika Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengemukakan / mengusulkan sesuatu yang masuk akal dengan menggunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur • Memberikan ide atau gagasan yang baik untuk kepentingan umum (BMKn [2], hlm 24) 	<p>orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengemukakan / mengusulkan sesuatu yang masuk akal dengan menggunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur • Memberikan ide atau gagasan yang baik untuk kepentingan umum (BMKn [2], hlm 52) 	<p>sesuatu yang masuk akal dengan menggunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan ide atau gagasan yang baik untuk kepentingan umum (BMKn [2], hlm 85) 		<p>berani menanggung resiko atau akibat dari segala perbuatannya (BMKn [2], hlm 151)</p>

Nilai budi pekerti pada buku teks BMKn (3) diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 8 Nilai Budi Pekerti pada Buku teks BMKn (3)

Bab 1 Usaha Pembelaan Negara	Bab 2 Otonomi Daerah	Bab 3 Globalisasi	Bab 4 Prestasi Diri demi Keunggulan Bangsa
<ul style="list-style-type: none"> • Cinta tanah air • Nasionalisme • Semangat kebangsaan, rasa ingin tahu, disiplin (BMKn [3], hlm 36) 	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat kebangsaan • peduli lingkungan • Bersahabat • Senang membaca • Kreatif (BMKn [3], hlm 72) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cinta tanah air • Senang membaca • Semangat kebangsaan • Kerja keras • Rasa ingin tahu (BMKn [3], hlm 104) 	<ul style="list-style-type: none"> • Senang membaca • Menghargai prestasi • Disiplin • Kerja keras • Rasa ingin tahu (BMKn [3], hlm 124)

Sementara itu, nilai pendidikan kewirausahaan yang penulis ungkap dalam bukunya adalah nilai komitmen, sebagaimana penjelasan berikut:

Komitmen

Permasalahan hak asasi manusia ternyata tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia. Penghormatan dan penegakan HAM pun telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional wajib dan turut serta dalam penegakan HAM. Dunia internasional memang telah berkomitmen kuat untuk menegakkan HAM di seantero dunia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari dunia ini maka Indonesia pun berkomitmen kuat untuk menegakkan HAM dan menyelesaikan persoalan HAM dengan baik dan benar. (BMKn [1], hlm 81)

Box tambahan nilai pendidikan kewirausahaan pada BMKn (1) ini, walaupun pemberian judulnya tidak tepat, tetapi substansi isinya berkaitan dengan pengembangan watak/karakter kewargaan siswa.

Watak kewargaan yang dikembangkan dalam buku teks BMKn (1), (2), dan (3) pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan karakter siswa baik sebagai individu, maupun sebagai bagian dari warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Branson (1998:23) yang menegaskan bahwa *civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Seperti halnya kompetensi keterampilan kewargaan, watak kewargaan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society* (masyarakat kewargaan). Pengalaman-pengalaman demikian menunjukkan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat, seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib, dan karakter publik, seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

KESIMPULAN

Secara *taxonomic*, buku teks PKn tingkat SMP/MTs yang diteliti memuat upaya pengembangan komponen kompetensi kewargaan sebagaimana peran dan fungsi Mata Pelajaran PKn. Namun demikian, pengembangan komponen

kompetensi kewargaan itu sebagian besar masih berorientasi pada penguatan komponen pengetahuan kewargaan.

Dilihat dari tiap-tiap komponen kompetensi kewargaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk pengembangan kompetensi pengetahuan kewargaan, penulis telah menyajikan dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan tuntutan Standar Isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, melengkapinya dengan gambar, dan menambahkannya dengan *box* biro hukum, info, tokoh, dan kamus kewarganegaraan.

Untuk pengembangan kompetensi keterampilan kewargaan, penulis menyajikan materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan kewargaan dan menambahkan *box* uji psikomotorik, atau bahkan uji kognitif dan uji afektif yang substansinya adalah uji psikomotorik. Sekalipun sudah diberi *box* tambahan berupa uji psikomotorik, tetapi tampak bahwa upaya pengembangan komponen itu belum secara tegas menunjukkan keterampilan intelektual yang memotivasi, merangsang, dan melatih kemampuan berpikir siswa kadar tinggi, dan keterampilan partisipatif yang menuntut partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan dalam pengembangan kompetensi watak kewargaan, penulis baru mengupayakannya melalui penyajian *box* nilai-nilai karakter bangsa dan nilai-nilai budi pekerti yang sifatnya pengetahuan konseptual semata, sekalipun bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai karakter bangsa yang dikembangkan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. (2006). *Analisis Isi Buku Teks dan Implikasinya dalam Pengembangan Bahan Ajar yang Dapat Memberdayakan Keterampilan Berpikir Siswa*. Disertasi SPs UPI: Tidak diterbitkan.
- Abdulkarim, Aim. (2010). *Mengokohkan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Sinergi Buku Ajar dan Budaya Belajar*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Arif, Dikdik Baehaqi. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Tesis SPs UPI: Tidak diterbitkan.

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. (1990). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*. Terjemahan oleh Munandir dari judul *Qualitative Research for Education: An introduction to Theory and Methods*. Jakarta: PAU PPAI Universitas Terbuka.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Center for Civic Education. (1994). *National Standard for Civics and Government*. Calabasas, California: Center for Civic Education.
- Cogan, John. J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Cresswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publication.
- Gafur, Abdul. (2012). *Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kerr, David. (1999). *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.
- Miles, M.B. dan Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patrick, J.J dan Vontz, T.S. “Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teachers”, dalam John J. Patrick dan Robert S. *Learning, Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teachers, Vol. 1*, Bloomington, IN:ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education, ERIC Clearinghouse for International Civic Education, and Civitas, 2001, pp. 39-64.
- Patrick, John J. (1999). “Education for Constructive Engagement of Citizenship in Democratic Civil Society and Government” dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick, *Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project*. Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Sosial Studies/Social Science Education and the ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education in association with Civitas, 1999. Pp. 41-60).

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Quigley, C.N., Buchanan, Jr. J. H., Bahmueller, C.F. (1991). *Civitas: A Frame Work for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Sapriya. (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa (Sebuah Kajian Konseptual-Filosofis PKn dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi SPs UPI: tidak diterbitkan.
- Somantri, M. Nu'man. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Kerjasama PT Remaja Rosdakarya dengan FPIPS dan PPs Universitas Pendidikan Indonesia.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. dan Schulz, W. (2001). *Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen*. Amsterdam: The International Association for The Evaluation of Educational Achievement.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winataputra, Udin S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.
- Winataputra, Udin S. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pencerdasan Kehidupan Bangsa*. Disampaikan pada Temu Sambut Guru Besar FKIP UT. Jakarta: FKIP UT.